



POTRET PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Mochammad Yana Aditya¹, Adi Musharianto² Taryana^{3(*)}

¹Program Studi Manajemen, ITB Ahmad Dahlan, Jakarta

²Program Studi Manajemen, ITB Ahmad Dahlan, Jakarta

³Program Studi Akuntansi, ITB Ahmad Dahlan, Jakarta

Abstract

This research provides an overview of national sharia cooperatives' performance during the COVID-19 pandemic. Financial institutions have significant problems, which consist of declining financial performance. The research object is a sharia cooperative that receives financial assistance from LPDB, which is part of the government program to recover the National Economy. The research results show that the object of the research gets a good performance predicate. Even though the study is a good performance, the financial performance has decreased due to a decrease in the amount of financing and the quality of assets. So, it is necessary to manage the funding so that the quality of productive assets is well-maintained.

Kata Kunci: Sharia Cooperatives, PEN, LPDB.

Informasi Artikel:

Dikirim: 05 Februari 2022

Ditelaah: 14 Maret 2022

Diterima: 22 Maret 2022

Publikasi daring [online]: 30 Juni 2022

Januari-Juni 2022, Vol 11 (1): hlm 11-22

©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(*) Korespondensi: muhammadyana@itb-ad.ac.id (M. Yana Aditya), adimusharianto@itb-ad.ac.id (Adi Musharianto) dan taryana@itb-ad.ac.id (Taryana)

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 telah memberikan dampak terhadap tatanan sosial ekonomi di pelbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Perekonomian Indonesia berkontraksi 5,32% selama triwulan II tahun 2020 (BPS, 2021). UMKM merupakan sektor terdampak covid-19 yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil survey BPS, selama juli-september 2020 tercatat 7,28% Usaha Mikro Kecil (UKM) berhenti beroperasi dan 15,45% berhenti sementara karena faktor regulasi. Selanjutnya, pada periode yang sama, jumlah tenaga kerja UKM berkurang sebesar 9,92% (BPS, 2021).

Bank Indonesia menjadikan UMKM sebagai kunci pendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah maraknya pandemi covid-19, UMKM masih menunjukkan ketahanannya dan memiliki potensi untuk bangkit pascapandemi (Bank Indonesia, 2020). Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menyalurkan dana sebanyak Rp 116,31 triliun sebagai dukungan terhadap UMKM. (Kementerian Keuangan, 2021). Bank Indonesia juga fokus terhadap transformasi ekonomi melalui pengembangan keuangan Syariah. Transformasi ini didasarkan pada sektor halal value chains (HVC) yang selama pandemi covid-19 kinerjanya mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2021). Bank Indonesia akan memperluas HVC melalui UMKM syariah serta unit ekonomi pesantren.

Baitul Mall Wattamwil (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana kepada UMKM. Pada masa pandemi covid-19 KSPPS maupun BMT harus terus meningkatkan kemampuan usahanya. Tujuannya tiada lain agar kinerja keuangannya tidak menurun tajam. Seluruh aspek operasional baik dari sisi pengelolaan risiko, kapasitas pengembangan usaha, manajerial, permodalan, penyaluran pembiayaan, dan aspek-aspek lainnya harus tetap ditingkatkan untuk menjaga tingkat kesehatan KSPPS. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan (Perdep) No. 7 Tahun 2016. Perdep ini mengatur tentang pedoman penilaian KSPPS. Terdapat dua faktor utama dalam mengukur tingkat kesehatan KSPPS. Kedua faktor tersebut terdiri dari faktor financial dan non-financial. Faktor financial diukur berdasarkan data kuantitatif melalui analisis rasio keuangan. Sedangkan faktor non-financial diukur berdasarkan data kualitatif meliputi aspek manajemen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memotret kondisi kesehatan salah satu koperasi syariah nasional pada masa pandemi berdasarkan Perdep No. 7 Tahun 2016.

TINJAUAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah. Kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh koperasi syariah yang tidak dilakukan koperasi konvensional adalah mengelola sedekah, infak, wakaf dan zakat. Kinerja koperasi syariah pada periode tertentu tercermin dalam tingkat kesehatan koperasi syariah.

Kementrian Koperasi telah menetapkan pedoman penilaian kesehatan koperasi dengan mengeluarkan Perdep No 6 tahun 2016 untuk koperasi konvensional dan Perdep No 7 tahun 2016 untuk koperasi syariah. Jika dibandingkan dengan Perdep No 6 tahun 2016, Perdep No 7 tahun 2016 menambahkan satu variabel yaitu variabel kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berdasarkan Perdep No 7 tahun 2016 tersebut terdapat delapan variabel yang dinilai dalam menentukan tingkat kesehatan koperasi syariah. Ke delapan variabel tersebut terdiri dari enam variabel kuantitatif dan dua variabel kualitatif. Variabel kuantitatif terdiri dari permodalan, jati diri koperasi, efisiensi, kualitas aktiva produktif, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan. Sedangkan variabel kualitatif terdiri dari variabel manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. Masing masing variabel memiliki rasio yang akan diberi skor dan bobot yang telah ditentukan. Kesehatan koperasi diperoleh dengan mengalikan hasil rasio dengan skor dan bobot. Secara lebih rinci definisi variabel dari kedelapan aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Permodalan

Permodalan diukur dengan dua rasio yang terdiri dari:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset (RMSTA)

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Rasio kecukupan modal (CAR)

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Kualitas aktiva produktif diukur dengan tiga Rasio yang terdiri dari:

a. Rasio tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan (RPPBPP)

$$\frac{\text{Jml Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jml Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

b. Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko (RPPB)

$$\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

$$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

PPAPWD: Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk

3. Manajemen

Penilaian aspek manajemen meliputi beberapa komponen yang terdiri dari komponen manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen asset, dan manajemen likuiditas. Perhitungan skor didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen yang terdapat dalam lampiran Perdep No. 07/ Per/Dep.6/IV/2016.

4. Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio berikut ini:

- a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi (RBOPP)

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

- b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset (RATTA)

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- c. Rasio Efisiensi Pelayanan (REP)

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

5. Likuiditas

Likuiditas diukur dengan rasio berikut ini:

- a. Cash Ratio (CR)

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- b. Rasio Pernbiayaan terhadap Dana yang diterima (FDR)

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

6. Jatidiri Koperasi

Jatidiri Koperasi diukur dengan rasio sebagai berikut:

- a. Rasio Partisipasi Bruto (RPB)

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Anggota + Jumlah Simpanan + Jumlah Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

- b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\frac{\text{MEP + SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

- a. Rentabilitas Asset (RA)

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b. Rentabilitas Ekuitas (RE)

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

- c. Kemandirian Operasional Pelayanan (KOP)

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

8. Kepatuhan Prinsip Syariah

Untuk mendapatkan nilai pada variabel kepatuhan syariah, peneliti melakukan wawancara terhadap direktur dan bendahara KSPPS. Wawancara

ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana aspek Syariah dilaksanakan dan dipatuhi oleh KSPPS. Perhitungan skor didasarkan kepada jawaban pertanyaan aspek kepatuhan syariah yang terdapat dalam lampiran Perdep No. 07 tahun 2016.

Predikat tingkat kesehatan koperasi syariah dibagi dalam 4 (empat) predikat, yang terdiri dari predikat Sehat ($80.00 \leq X < 100$), Cukup Sehat ($66.00 \leq X < 80.00$), Dalam Pengawasan ($51.00 \leq X < 66.00$), dan Dalam Pengawasan Khusus ($0 < 51.00$). (Kementerian Koperasi, 2016).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan data yang terdiri dari data primer berupa jawaban hasil wawancara terkait manajemen dan kepatuhan syariah dan data sekunder berupa laporan keuangan. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan dari bulan Februari sampai dengan Juni 2021 dengan objek penelitiannya adalah KSPPS BMT X yang terletak di Kota Tegal. Objek penelitian ini dipilih karena pada tahun 2020 KSPPS BMT X telah menjadi koperasi syariah nasional yang mendapatkan bantuan sebesar Rp 40 miliar dari Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB).

Penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: (a) Mengumpulkan data yang terdiri dari laporan keuangan tahun 2020, Laporan RAT beserta dokumen penting lainnya; (b) Mengukur tingkat kesehatan koperasi syariah berdasarkan Perdep No. 7 tahun 2016; (c) Membandingkan tingkat kesehatan koperasi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya; (d) Memotret penilaian kesehatan KSPPS berdasarkan Perdep No. 07 tahun 2016 pada masa pandemi.

Analisa data dalam mengukur tingkat kesehatan KSPPS merujuk kepada Perdep No. 07 tahun 2016. Teknik analisa menggunakan metode analisa deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisa deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan pada aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi dan aspek kemandirian dan pertumbuhan. Sementara analisis data kualitatif digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi pada aspek manajemen dan kepatuhan terhadap syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penilaian kesehatan KSPPS BMT X tahun 2020 berdasarkan Perdep No. 07 tahun 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil penilaian Kesehatan KSPPS BMT X

Aspek Penilaian dan Indikator	PERDEP		BMT X 2020	
	Rasio Sehat	Bobot nilai	Rasio BMT	Bobot nilai
Permodalan		10		6,25
a. RMSTA	$\geq 20\%$	5	6,67%	1,25
b. CAR	$> 8\%$	5	8,46%	5,00
KAP		20		14,50
a. RPPBPP	$< 5\%$	10	8,27%	7,50

b. RPPB	< 21%	5	8,27%	5,00
c. Rasio PPAP	100%	5	39,68%	2,00
Manajemen		15		13,80
a. MU	3	3	3	3
b. Kelembagaan	3	3	3	3
c. MP	3	3	1,8	1,8
d. MA	3	3	3	3
e. ML	3	3	3	3
Efisiensi		10		6,50
a. RBOPP	< 71%	4	89,83%	2,00
b. RATTA	≤ 25%	4	6,94%	4,00
c. REP	>99%	2	6,02%	0,50
Likuiditas		15		10,00
a. CR	26%-34%	10	39,87%	7,50
b. FDR	>99%	5	64,15%	2,50
Jatidiri Koperasi		10		10,00
a. RPB	≥ 75%	5	100,00%	5,00
b. Rasio PEA	≥ 12%	5	47,08%	5,00
Kemandirian dan Pertumbuhan		10		9,00
a. RA	≥ 10%	3	16,94%	3,00
b. RE	≥ 10%	3	6,66%	2,00
c. KOP	> 150%	4	273,76%	4,00
Kepatuhan Prinsip Syariah		10	10,00%	10,00
Total Skor		100		80,50
Predikat				Sehat

Sumber: olah data laporan keuangan berdasarkan Perdep No. 07 tahun 2016

1. Permodalan

Berdasarkan tabel 1, Perdep No. 07 tahun 2016 mensyaratkan KSPPS yang sehat memiliki rasio modal sendiri terhadap total asset lebih besar dari 20%. Sementara pada tahun 2020, rasio modal sendiri terhadap total asset KPPS BMT X hanya sebesar 6,67%. KSPPS BMT X memerlukan suntikan modal sebesar 14% untuk memperoleh predikat sehat dari sisi moda. Untuk memperoleh tambahan modal tersebut sangat sulit, mengingat komposisi modal anggota dari simpanan wajib dan simpanan pokok sangat rendah. Salah satu strategi meningkatkan rasio modal terhadap asset adalah dengan menambah simpanan anggota yang bersumber dari Simpanan Wajib Khusus (SWK)

Berdasarkan tabel 2., pada tahun 2020 56% dari keseluruhan modal KPPS BMT X bersumber dari modal SWK. Namun demikian, penambahan suntikan modal yang bersumber dari SWK bukan tanpa masalah, modal SWK merupakan modal *cost of fund* yang sangat tinggi. Penambahan modal SWK akan berdampak pada penyerapan SHU yang sangat besar yang harus disiapkan secara husus oleh KSPPS BMT X bagi pemilik modal SWK. Untuk itu diperlukan alternatif lain dalam menambah amunisi dana terutama dana dari Pemerintah dalam hal ini Kementraian Koperasi dimana dana tersebut bisa di kelola oleh koperasi dan memiliki *cost of fund* yang cukup rendah.

Rendahnya rasio modal sendiri terhadap total asset menyebabkan tingginya porsi simpanan anggota yang menjadi sumber utama asset. Dengan demikian 87% dari asset yang dimiliki KSPPS BMT X bersumber dari simpanan anggota.

Tabel 2. Aset dan Komponen Modal BMT X (dalam jutaan Rp)

No. Aset dan Modal	2018	2019	2020
1. Aset	55.798	70.905	77.738
2. Simpanan Anggota	49.579	64.533	67.528
3. Liabilitas	2.847	1.631	4.013
4. Modal	2.999	3.928	4.465
a. Modal anggota	1.065	710	828
b. Modal SWK	1.934	2.678	2.917
c. Cadangan umum		405	584
d. Modal sumbangan		136	136
e. SHU belum dibagi	281	812	719
3. Modal Tertimbang	2.999	3.928	4.465
4. ATMR	41.825	52.271	52.811

Sumber: Hasil olah data lap. keuangan BMT X

Pada awal munculnya covid-19, Kementerian Koperasi berupaya memitigasi dampak covid dengan turut serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional yang salah satunya melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) UMKM. KSSPS BMT X menjadi salah satu koperasi Syariah yang menerima bantuan dari LPDB sebesar 4 miliar yang menyebabkan komposisi liabilitas terhadap total aset bertambah dari 2,30% pada tahun 2019 menjadi 6,46% pada tahun 2020.

Indikator lain yang dijadikan penilaian dalam aspek permodalan adalah rasio kecukupan modal (CAR). Berdasarkan table 1, rasio CAR KSPPS BMT X diatas standar yang ditetapkan Perdep yaitu sebesar 8.46% sehingga memperoleh predikat sehat.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Salah satu aspek penilaian kesehatan yang paling terdampak akibat adanya covid-19 bagi KSPPS BMT X adalah Kualitas Aktiva Produktif. Berdasarkan table 1. pada tahun 2020, Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan adalah sebesar 8.27%. persentasi ini berada pada rentang 5% - 8% dan mendapat predikat cukup lancar. Padahal pada tahun 2019, sebelum pandemi covid-19 melanda negara Indonesia, rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan KSPPS BMT X adalah sebesar 4,85% dan mendapat predikat lancar.

Tabel 3. Kolektibilitas KSPPS BMT X (OS Pembiayaan dalam jutaan Rp)

Kol.	2018		2019		2020	
	Jml Rek	OS Pemb.	Jml Rek	OS Pemb.	Jml Rek	OS Pemb.
L	2.493	33.106	3.159	41.751	2.666	39.733
KL	92	260	79	753	150	1.362
D	78	739	60	608	87	710
M	156	801	211	764	402	1.510
Jml	2.819	34.907	3.509	43.878	3.305	43.316

L: Lancar, KL: KurangLancar, D: Diragukan dan M: Macet

Sumber: Hasil olah data lap. keuangan BMT X

Berdasarkan Tabel 3. Secara kuantitas jumlah rekening pembiayaan mengalami penurunan dari 3.509 rekening pada 2019 menjadi 3.305 rekening pada tahun 2020.

Sebaliknya, jumlah pembiayaan bermasalah justru mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, jumlah rekening pembiayaan dengan kolektibilitas lancar adalah 3.159 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2.666 rekening. Artinya terdapat 493 rekening yang kolektibilitasnya mengalami kenaikan dari lancar menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan bahkan Macet. Bahkan kenaikan pembiayaan bermasalah hampir terjadi pada seluruh kolektibilitas.

Berbeda dengan 2 tahun sebelum pandemi, jumlah rekening pembiayaan mengalami kenaikan dari 2.493 rekening pada 2018 menjadi 3.159 rekening pada tahun 2019. Kenaikan jumlah rekening tersebut diiringi dengan kenaikan jumlah pembiayaan yang lancar. Terdapat pergeseran dari kolektibilitas Diragukan dan Kurang Lancar menjadi Lancar. Hanya kolektibilitas Macet saja yang mengalami kenaikan dari 156 rekening pada tahun 2018 menjadi 211 rekening di tahun 2019.

KSPPS BMT X harus memberikan perhatian khusus terhadap jumlah outstanding pembiayaan bermasalah yang semakin meningkat dari 2,1 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 3,6 miliar rupiah di tahun 2020. Peningkatan yang paling besar terdapat pada kolektibilitas Macet yakni terjadi peningkatan sebesar 746 juta rupiah. Jika merujuk peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020, KSPPS BMT X dapat merelaksasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi bisa dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, menurunkan margin pembiayaan, mengurangi tunggakan pokok dan atau margin atau dengan menambah fasilitas pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

3. Manajemen

Perhitungan bobot nilai pada aspek manajemen didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan seluruh komponen aspek manajemen yang terdapat dalam lampiran Perdep No. 07/ tahun 2016. Secara keseluruhan KSPPS BMT X memiliki nilai yang positif. KSPPS BMT X memperoleh predikat baik untuk komponen manajemen umum, kelembagaan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Sedangkan untuk komponen manajemen permodalan mendapatkan predikat kurang baik. Pada aspek manajemen KSPPS BMT X mendapatkan skor 13 dari skor 15 untuk predikat sehat.

4. Efisiensi

Penilaian aspek efisiensi dapat dilihat dari rasio Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto (RBOPPB), Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset (RATTA) dan Rasio Efisiensi Pelayanan (REP). Rasio tersebut memberikan gambaran seberapa efisien penggunaan aset koperasi syariah dalam memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya. Hasil perhitungan menunjukkan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi KSPPS mengalami penurunan dari 94,13% pada tahun 2018 menjadi 89,83% pada tahun 2020, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dari sisi efisiensi namun kriteria yang diperoleh berdasarkan Perdep adalah kurang efisien.

Selanjutnya hasil perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total aset adalah sebesar 6,94% pada tahun 2020. Nilai tersebut berada pada rentang 0%-25%. Artinya rasio aktiva tetap terhadap total aset KSPPS BMT X mendapatkan kriteria baik. Sementara hasil perhitungan dari rasio efisiensi pelayanan. KSPPS BMT X

adalah sebesar 6,02%, berada dibawah 50%, yang berarti memperoleh kriteria tidak baik. Total skor KSPPS BMT X pada aspek efisiensi adalah sebesar 8,5 dengan predikat cukup efisien.

Tabel 4. Rasio Efisiensi KSPPS BMT X

Efisiensi	2018	2019	2020
a. RBOPP	94,13%	88,79%	89,83%
b. RATTA	9,59%	7,46%	6,94%
c. REP	4,52%	5,78%	6,02%

Sumber: Hasil olah data lap. keuangan BMT X

5. Likuiditas

Indikator yang digunakan dalam aspek Likuiditas adalah cash ratio dan Rasio Rasio pernbiayaan terhadap dana yang diterima. Bobot nai maksimal yang bisa dicapai pada aspek ini adalah 15 poin.

Pengukuran likuiditas pada koperasi tidaklah berbeda dengan perbankan. Hal ini disebabkan karena fungsi koperasi hampir sama dengan perbankan yakni menghimpun dana dari anggota dan menjadikan dana yang terhimpun menjadi aset produktif yang akan dipakai oleh anggota koperasi lainnya. Koperasi memperoleh sebagian besar keuntungannya dari proses penyaluran dana tersebut.

Pertimbangan likuiditas bank bersifat dilematis. Dari sisi aset, bank harus mengaktivkan aset produktifnya sehingga tidak ada uang yang *idle*. Sementara dari sisi liabilitas, bank harus dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada para debitur yang bisa menarik tabungannya kapan saja dan dimana saja. Bank harus tetap mempersiapkan cadangan uang yang cukup untuk tetap menjaga likuiditasnya (Martawireja A. E., 2007)

Perdep No. 07 tahun 2016 mensyaratkan KSPPS memiliki *cash ratio* sebesar 26%-34% dan FDR harus lebih besar 99%. Memaksimalkan FDR sangatlah logis karena dengan memaksimalkan FDR KSPPS bisa memperoleh keuntungan yang optimal. Namun Hal ini tidak lah mungkin, sebab jika KSPPS ingin memaksimalkan FDR sebesar 99% maka secara tidak langsung likuiditas KSPPS akan terganggu. Dana yang diterima dari anggota sangatlah likuid. KSPPS tidak bisa melarang anggotanya yang akan menarik dananya dari KSPPS kapan saja. Sementara itu pembiayaan yang disalurkan memiliki tingkat likuiditas yang sangat rendah. KSPPS tidak bisa langsung menarik seluruh dana dari anggotanya secara tiba-tiba. Likuiditas dan Profit memiliki sisi yang berdeda (Martawireja & Harun, 2020)

Pada tabel 5. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 *cash ratio* KSPPS BMT X sebesar 39,87%. Sedangkan FDR KSPPS BMT X sebesar 64,15%. Sebagai bahan perbandingan, dari tahun 2018 sampai 2020, *cash ratio* KSPPS BMT X mengalami kenaikan sementara FDR mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan terdapat sekitar 15% uang yang menganggur (*idle money*). Tingginya *idle money* ini disebabkan kondisi ekonomi yang masih belum membaik akibat dampak negatif covid-19. KSPPS sangat berhati-hati ketika menyalurkan pembiayaan. Namun demikian KSPPS bisa membuka peluang untuk membuka

investasi pada instrument lain yang tetap memberikan imbal hasil namun memiliki risiko yang lebih rendah seperti membeli surat berharga. (Wardani, Sasongko, & Mulyaningsih, 2020).

Tabel 5. Rasio Likuiditas KSPPS BMT X

Likuiditas	2018	2019	2020
a. CR	30,00%	32,76%	39,87%
b. FDR	70,41%	67,99%	64,15%

Sumber: Hasil olah data lap. keuangan BMT X

6. Jati Diri Koperasi

Adanya aspek jati diri koperasi adalah untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mempromosikan ekonomi anggota. Aspek ini menggunakan Rasio Partisipasi Bruto (RPB) dan Promosi Ekonomi Anggota (PEA). Hasil perhitungan pada rasio partisipasi bruto pada tahun 2020 adalah sebesar 100% yang berarti bahwa KSPPS BMT X memiliki kemampuan melayani anggota sangat tinggi. Sementara hasil perhitungan rasio promosi ekonomi anggota ada tahun 2020 adalah sebesar 47,08%, berada diatas nilai maksimal yang ditetapkan Perdep yakni sebesar 12%. Artinya KSPPS BMT X mampu memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simanan wajib. Secara lebih rinci hasil perhitungan aspek jati diri koperasi terdapat pada tabel 6.

Tabel 6. Rasio Jati Diri Koperasi KSPPS BMT X

Jati Diri Koperasi	2018	2019	2020
a. RPB	100,00%	100,00%	100,00%
b. PEA	35,12%	54,91%	47,08%

Sumber: Hasil olah data lap. keuangan BMT X

7. Kemandirian dan Pertumbuhan.

Aspek kemandirian dan pertumbuhan dinilai dengan tiga rasio, yaitu rasio rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional pelayanan. Dari ketiga rasio tersebut, selain rasio rentabilitas ekuitas, KSPPS memperoleh kriteria tinggi. Rasio rentabilitas ekuitas memperoleh kriteria cukup.

Tabel 7. Rasio Likuiditas KSPPS BMT X

Kemandirian dan Pertumbuhan	2018	2019	2020
a. Rentabilitas Aset	6,93%	20,62%	16,94%
b. Rentabilitas Ekuitas	5,47%	8,22%	6,66%
c. Kemandirian Operasional Pelayanan	352,51%	277,91%	273,76%

Sumber: Hasil olah data lap. keuangan BMT X

8. Kepatuhan Prinsip Syariah.

Perhitungan bobot nilai pada aspek syariah didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban sepuluh pertanyaan komponen aspek syariah dengan bobot 10% yang

terdapat dalam lampiran Perdep No. 07/ tahun 2016. Setiap jawaban positif akan memperoleh nilai kredit 1. Dari jawaban hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan, KSPPS BMT X mendapatkan skor 10 artinya KSPPS BMT X mendapatkan nilai positif/patuh terhadap ketentuan syariah.

Penetapan kesehatan

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap delapan aspek tersebut diatas, diperoleh skor sebesar 80.50 dengan predikat sehat.

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran tentang kesehatan koperasi syariah nasional pada masa pademi covid-19. Objek pada penelitian ini adalah salah satu koperasi syariah penerima dana bergulir dari LPDB yang merupakan bagian dari program pemerintah dalam rangka memulihkan Ekonomi Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek penelitian mendapatkan predikat sehat dengan skor 80.50. Walaupun objek penelitian mendapatkan predikat sehat, namun predikat sehat pada koperasi tersebut masih belum menggambarkan penurunan kinerja keuangan. Objek penelitian mengalami penurunan jumlah pembiayaan, penurunan kualitas aktiva dan kenaikan jumlah kredit bermasalah. Sehingga diperlukan adanya manajemen khusus untuk mengelola pembiayaan agar kualitas aktiva produktif tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Analisis Hasil Survei Dampak Covid 19 Terhadap Pelaku Usaha #2*. Jakarta: BPS RI.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. (2016). *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No/07/Per/Dep/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi*.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah. (2016). *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No/06/Per/Dep/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. (2016). *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No/07/Per/Dep/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi*.

- Martawireja, A. E. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri 2004-2006)*. Jakarta: Graduate Program of the University of Indonesia.
- Martawireja, A. E., & Harun, T. (2020). Factors Which Influence Liquid Assets In Sharia Banks: A Case Study Of Pt Bank Syariah Mandiri 2016-2017. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 133-146.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.
- Pernando, A. (2020, April). *Restrukturisasi Kredit, Ini 4 Hal yang Mesti Dipertimbangkan Sebelum Minta Keringanan Cicilan*. Diambil kembali dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200414/90/1227121/restrukturisasi-kredit-ini-4-hal-yang-mesti-dipertimbangkan-sebelum-minta-keringanan-cicilan>.
- Wardani, D. P., Sasongko, H., & Mulyaningsih, M. (2020). Pengaruh Risiko Investasi Dan Likuiditas Saham Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014-2018. *Jurnal Online Mahasiswa*, 3.